

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Zuhali, Wahbah, *Ushul al-Fiqh-al Islami*, Damaskus: Daral-Fiqr, 2001.
- BPMDK Kabupaten Tulungagung dalam Peraturan Bupati (Perbup) Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Pedoman Umum Dan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Tulungagung Tahun 2019, diakses pada tanggal 4 November 2020.
- Buku saku dana desa dalam <https://kemenkeu.go.id>, diakses pada tanggal 6 November 2020.
- Data dan Statistik Umum Tulungagung dalam <https://tulungagung.go.id>, diakses pada tanggal 6 Juni 2021
- Djazuli, H.A, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Hasil Observasi di Jalan Desa Kedungwaru pada tanggal 25 November 2019.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Jaelani, Abdul Qadir, *Negara Ideal Menurut Konsep Islam*, Surabaya: PT.Bina Ilmu, 2006.
- Jumlah Desa/Kelurahan di Indonesia dalam <https://www.bps.go.id> diakses pada 4 Juni 2021.
- Kahallaf, Abdul Wahab, *Politik Hukum Islam*, Yogyakarta: PT.Tiara Wacana, 1994.
- Kasus Mantan Kades Semarang dalam <https://jateng.tribunnews.com> diakses pada tanggal 4 November 2020.
- Latar Belakang Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-6-2014>, diakses pada tanggal 11 Juli 2021.
- Metodologi Menurut KBBI dalam <https://kbbi.web.id/metodologi>, diakses pada tanggal 17 November 2020.
- Pasal 1 ayat (9) Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Bupati No.89 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum dan Rincian Alokasi Dana Desa Pada Setiap Desa di Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2020 dalam <https://jdih.prokumtulungagung.go.id.pdf>, diakses pada tanggal 15 Februari 2021.
- Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Perencanaan Pembangunan dalam <https://bps.go.id> diakses pada 8 November 2020.

Peraturan Presiden No.2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 32.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 55 ayat (1).

Pulungan, Suyuthi, *Fiqih Siyash dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Sedarmayanti, *Good Governace (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Bandung: Mandar Maju, 2009.

Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2009.

Soemantri, Bambang Trisantono, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Bandung : Fokus Media, 2011.

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Elfabeta, 2007.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18.

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Wawancara dengan Kepala Desa Pada Tanggal 20 Februari 2020.

Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Kedungwaru Pada Tanggal 20 Februari 2021.